

BAB V

KESIMPULAN

Hubungan Indonesia-Malaysia diawali dengan rasa nasionalisme yang sama diantara pemuda-pemuda Tanah Melayu dan Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa asing. Awal hubungan yang baik tidak selalu dapat disimpulkan bahwa kedepannya hubungan akan terus berjalan dalam kondisi yang baik. Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia dari setiap era pemerintahan ke era pemerintahan selanjutnya diiringi dengan berbagai macam masalah yang sering menjadi penyebab kurang harmonisnya hubungan kedua negara. Namun dinamika permasalahan yang terjadi tidak membuat hubungan menjadi benar-benar berhenti karena kerjasama-kerjasama di berbagai bidang menguntungkan bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing negara.

Sehingga oleh sebab itu, Indonesia dan Malaysia membangun kerjasama untuk menangani kejahatan perdagangan narkoba internasional. Indonesia telah darurat narkoba dan Malaysia telah menjadikan narkoba sebagai musuh nomor satu negara sejak tahun 1983. Indonesia dan Malaysia juga telah memiliki perundang-undangan khusus untuk menangani kasus narkoba dan kemudian memiliki instansi khusus untuk menangani kejahatan narkoba yang kemudian bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Namun dalam upaya penanganan masing-masing negara tidak serta sendiri melakukan upaya penanganan kejahatan perdagangan narkoba internasional. Dalam hal ini Indonesia-dan Malaysia melakukan kerjasama khusus untuk penanganan kejahatan perdagangan narkoba internasional.

Kerjasama penanganan masalah kejahatan perdagangan narkotika internasional dilakukan diperbatasan di darat dan lebih terkhususnya di area laut, karena 80% penyelundupan narkotika dilakukan melewati jalur laut. Kemudian daerah yang cukup menjadi perhatian adalah wilayah Kepulauan Riau, karena Kepulauan Riau adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta langsung berhadapan dengan Selat Malaka yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.

Khusus di Kepulauan Riau, Polda Kepri dan BNNP Kepulauan Riau sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan kejahatan ini, melakukan kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak pusat, karena kedua lembaga ini merupakan lembaga vertikal yang tugas dan kerjasama dilakukan berdasarkan keputusan dari markas besar di pusat. Kerjasama ini dilakukan antara Polri dengan PDRM dan BNN dengan AADK. Karena pihak-pihak tersebut adalah jajaran terdepan untuk mengungkapkan kasus yang berkaitan dengan narkotika.

Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil bahwa Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama karena kedua negara memiliki kepentingan nasional yang sama, yaitu ingin menjadikan negara mereka terbebas dari narkotika. Karena setiap tahun peredaran narkotika di Indonesia dan Malaysia cukup tinggi. Dengan peredaran yang tinggi di kedua negara, membuat Indonesia dan Malaysia terancam krisis SDM, karena pengguna narkoba mayoritas berada di usia produktif dan dapat membuat mereka menjadi pecandu dan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan akan berakhir pemecatan.

Selain itu dalam bidang ekonomi, narkotika memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menyebabkan kerugian

negara karena pertama, narkoba ditransaksi dengan uang resmi tetapi tidak tercatat di negara, hal ini yang kemudian membuat negara mengalami kerugian secara ekonomi. Kedua karena setiap pecandu yang ditangkap ataupun menyerahkan diri, akan dimasukkan kedalam rumah rehabilitasi yang berarti negara membutuhkan biaya untuk dapat mengakomodasi setiap pecandu yang akan di rehabilitasi.